



# **Rancangan Akhir**

## RENJA TAHUN 2023

Sekretariat DPRD Kota  
Balikpapan

---

## KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2023 akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan Rancangan Awal Renja yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023.

Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Balikpapan, 11 Juli 2022  
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan

  
IRFAN TAUFIK, S.Ag./M.Si

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021 .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	18
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN .....	19
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	20
3.3 Program dan Kegiatan .....	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	32
BAB V PENUTUP .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel T-C. 29 .....	9
Tabel 2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	13
Tabel 3 : Tabel T-C.30 .....	15
Tabel 4 : Tabel TC. 31 .....	17
Tabel 5 : Tabel T-C. 32 .....	18
Tabel 6 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.....	22
Tabel 7 : Rancangan Akhir RKPD 2023 .....	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 50 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD tersebut, diperlukan adanya rencana kerja tahunan yang memberikan arah dan acuan yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun untuk itu Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menyusun Renja sebagai salah satu acuan pelaksanaan kegiatan.

Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah yang memuat rencana program dan kegiatan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun Rencana kerja dan pendanaan mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2023 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan, sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga negara RI Tahun 2015 No 08 Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5670);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
10. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Balikpapan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

### **b. Tujuan**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2023 agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD berdasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Mengemukakan Pengertian Ringkas tentang Renja SKPD keterkaitan antar Renja SKPD dengan Dokumen RKPD Renstra SKPD serta Tindak lanjutnya Proses Penyusunan RAPBD.
- 1.2 Landasan Hukum  
Memuat tentang Peraturan Perundang undangan serta peraturan Daerah Lainnya.
- 1.3 Maksud dan Tujuan  
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD
- 1.4 Sistematika Penulisan  
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).



### **BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai: Jumlah program dan jumlah kegiatan. Serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-SKPD Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota DPRD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja Sekretariat DPRD dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien.

Realisasi dan Evaluasi Program/kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keberhasilan pencapaian target kinerja mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD, sehingga diharapkan anggota DPRD dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Untuk pemenuhan terhadap sasaran tersebut, maka pada tahun 2021 telah dilakukan pembiayaan (APBD) untuk pelaksanaannya, yaitu melalui 2 (dua) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 90.580.083.811,- dan realisasi sebesar Rp 73.140.652.300,-.

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan dapat dijabarkan bahwa telah terlaksana dengan baik program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2021 dengan capaian keuangan sebesar 84,56% dan capaian fisik sebesar 93,61%. Adapun pematangan dalam capaian Fisik Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Adapun review hasil evaluasi realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, antara lain :

1. Pada Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi fisik mencapai 100% dan pada realisasi keuangan mencapai 67,15%, hal ini dikarenakan berkurangnya intensitas rapat-rapat dan kunjungan kerja dari daerah/instansi lain selama masa pandemi;
2. Pada Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasi fisik 100% dan pada realisasi keuangan mencapai 53.26%, hal ini dikarenakan adanya efisiensi realisasi keuangan namun pemenuhan target tercapai;
3. Pada Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, pada realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 43.41%, hal ini dikarenakan realisasi fisik telah tercapai namun dilakukan efisiensi terhadap realisasi anggarannya.
4. Pada Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, realisasi fisik 100% realisasi keuangan 79,22%, hal ini dikarenakan telah tercapainya target yang sesuai dengan perencanaan yaitu pakaian dinas dan atribut 45 anggota DPRD;
5. Pada Sub kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, realisasi Fisik 53.57% dan keuangan 73.24% hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang tidak direalisasikan mengikuti rencana kerja yang ditetapkan DPRD serta pembatasan kegiatan rapat-rapat yang disebabkan pandemic covid 19;
6. Pada Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah ,realisasi fisik 51,67% dan realisasi keuangan 75,08%, hal ini dikarenakan realisasi kinerja mengikuti rencana kerja DPRD sehingga disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang ditentukan oleh DPRD;
7. Pada sub kegiatan Pembahasan APBD, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 82,22%, hal ini dikarenakan telah tercapainya realisasi fisik pembahasan rapat-rapat APBD yang Sebagian dilaksanakan secara daring/online sehingga terjadi efisiensi pada penggunaan anggaran;
8. Pada Sub kegiatan Pelaksanaan Reses, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 81.85% hal ini dikarenakan pelaksanaan reses telah terpenuhi sesuai target, namun terdapat kelebihan penganggaran pada rincian belanja yaitu pada belanja sewa tenda/ sound system;
9. Pada Sub kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 78.70% dikarenakan telah terealisasi sesuai target kinerja, namun dalam realisasi keuangan terdapat silpa;

10. Pada Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 89,41% dikarenakan target kinerja telah tercapai dan terjadi efisiensi penggunaan anggaran;
11. Pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,92%, target kinerja tercapai, realisasi keuangan tinggi/ mendekati capaian 100%;
12. Pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi fisik 100%, realisasi keuangan 88,89%;
13. Pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, realisasi Fisik 94,06% dan realisasi keuangan 88,08% target kinerja terpenuhi namun terdapat silpa;
14. Pada Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 94,80%
15. Pada Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD, realisasi fisik 93,80% dan realisasi keuangan 87,93%
16. Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis DPRD, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,11%
17. Pada Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,82%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Program atau kegiatan Sekretariat DPRD yang menunjang keberhasilan, antara lain :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 69,03 atau predikat B hal ini salah satunya dikarenakan telah melaksanakan perbaikan-perbaikan atas Laporan Hasil Evaluasi;
2. Secara keseluruhan realisasi fisik relatif tinggi yaitu 93,61% karena meskipun tahun 2021 merupakan tahun kedua masa pandemi Covid 19, namun Sekretariat DPRD telah mengantisipasi hal tersebut dengan pengadaan peralatan pendukung rapat-rapat online, pengadaan alat-alat pendukung rapat tatap muka sesuai dengan protokol Kesehatan, serta pengadaan belanja penambah imun tumbuh dan lain sebagainya.
3. Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional  
Sekretariat DPRD tidak memiliki target kinerja dengan standar nasional

**Tabel 1 :**  
**Tabel T-C. 29**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tahun 2022**  
**Kota Balikpapan**

Nama PD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 (Juni)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
4.02.02	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	Persentase Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	100%	86.30%	100%	-	-	100%	100%	86.30%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	63%	100%	40.11%	40.11%	100%	100%	40.11%
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%	100%	12.59%	12.59%	100%	100%	12.59%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	-	100%	39.64%	39.64%	100%	100%	39.64%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%	53.84%	53.84%	100%	100%	53.84%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masy	100%	100%	100%	64.17%	64.17%	100%	100%	64.17%
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%	100%	1,76%	1,76%	100%	100%	1,76%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 (Juni)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	-	100%	-	-	100%	100%	-
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	100%	100%	30%	30%	100%	100%	30%
X.XX.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</b>	<b>72</b>	<b>n/a</b>	<b>70</b>	-	-	<b>72</b>	<b>72</b>	-
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	68	n/a	66	-	-	68	68	-
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72	n/a	<b>70</b>	-	-	72	72	-
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	72	n/a	<b>70</b>	-	-	72	72	-
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72	n/a	<b>70</b>	-	-	72	72	-
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72	n/a	<b>70</b>	-	-	72	72	-
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Kegiatan Pengadaan BMD	72	n/a	<b>70</b>	-	-	72	72	-
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	n/a	<b>70</b>	-	-	72	72	-
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	n/a	<b>70</b>	-	-	72	72	-

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 (Juni)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD sampai dengan tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	72	n/a	<b>70</b>	-	-	72	<b>72</b>	-
X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	72	n/a	<b>70</b>	-	-	72	<b>72</b>	-

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai fasilitator kegiatan DPRD, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Fasilitator kegiatan DPRD Kota Balikpapan. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berdasarkan Indikator Kinerja pada Renstra 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana.
2. Persentase Fasilitasi Rapat rapat Dewan Tepat Waktu.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Sedangkan pada Renstra 2021-2026 indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Reformasi Birokrasi
3. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD

Pengukuran tingkat capaian Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 2 :**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Kota Balikpapan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase Ketepatan agenda sidang (persen)		100%	100%	100	100	100	100	100	74	69	93,3	74,28	94,28	74	69	93	74	94
2	Persentase penyaluran aspirasi atau pengaduan masyarakat		100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah		B (60.00)	B (60.00)	B	B	B	B	B	D (39)	C (42)	CC (56)	CC (59)	B (63)	65	70	93	98	105
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100	100	100	100	100	90	76	91	104	82	90	76	91	104	82
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	100	100	100	100	100	99	121	113	133	98	99	121	113	133	98
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	100%	100	100	100	100	100	94	47	93	104	76	94	47	93	104	76
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	100	100	100	100	100	0	0	68	100	0	0	0	68	100	0

8	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	100%	100%	100	100	100	100	100	100	72	0	0	188	104	72	0	0	188	104
9	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	100%	100	100	100	100	100	100	70	54	62	92	60	70	54	62	92	60
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	48	110	75	24	100	48	110	75	24

**Tabel 3 :**  
**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Kota Balikpapan**

No .	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kepuasan Masyarakat	70	72	74	76	-	-	-	-	Merupakan Indikator Renstra 2021-2026
			Nilai Reformasi Birokrasi	27	28	29	30	-	-	-	-	
			Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	70	72	74	76	-	-	-	-	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-SKPD Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota DPRD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja Sekretariat DPRD dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien.

Permasalahan-permasalahan yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

a. Kelembagaan dan Organisasi

Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang diatur melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini memerlukan penyesuaian kedepannya sehingga dapat meningkatkan daya dukung terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

b. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia ( SDM ) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara optimal;

c. Tugas utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD;

d. Adanya Pandemi Covid 19 yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Sekretariat DPRD, maka fungsi dan tugas Sekretariat DPRD terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra PD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4 :**  
**Tabel TC. 31**

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023											
KOTA BALIKPAPAN											
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	72	Rp 148,039,778,492	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	72	Rp 148,039,778,492	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72	Rp 5,446,070,100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72	Rp 5,446,070,100	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72	Rp 445,660,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72	Rp 445,660,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72	Rp 31,605,270,648	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72	Rp 31,605,270,648	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	Rp 824,999,994	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	Rp 824,999,994	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	Rp 7,401,780,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	Rp 7,401,780,000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	Rp 54,150,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	Rp 54,150,000,000	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	72	Rp 39,795,827,000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	72	Rp 39,795,827,000	
9	Layanan Administrasi DPRD	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	72	Rp 8,370,170,750	Layanan Administrasi DPRD	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	72	Rp 8,370,170,750	
10	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Kota Balikpapan	<b>Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi</b>	74%	Rp 50,030,442,229	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Kota Balikpapan	<b>Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi</b>	74%	Rp 50,030,442,229	
11	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	Rp 9,782,999,750	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	Rp 9,782,999,750	
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	Rp 3,800,000,000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	Rp 3,800,000,000	
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Rp 5,099,997,500	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Rp 5,099,997,500	
14	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	Rp 10,660,448,179	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	Rp 10,660,448,179	
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	Rp 5,700,000,000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	Rp 5,700,000,000	
16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	Rp 1,099,498,250	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	Rp 1,099,498,250	
17	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	Rp 399,999,800	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	Rp 399,999,800	
18	Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	Rp 13,487,498,750	Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	Rp 13,487,498,750	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

**Tabel 5 :**  
**Tabel T-C. 32**

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019  
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>NIHIL</b>					

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi **Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Makmur, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan visi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan “Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Fasilitasi dan Fungsi DPRD Kota Balikpapan “ serta dengan memperhatikan Misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yaitu :

1. Menyelenggarakan pelayanan prima dan memfasilitasi sarana dan prasarana guna peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD
2. Menyelenggarakan Pelayanan yang memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan.
3. Melaksanakan Tertib administrasi sesuai dengan Peraturan dan ketentuan untuk mendukung akuntabilitas akuntabilitas kinerja Setwan dan Anggota DPRD.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Renja Sekretariat DPRD disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dan dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.



Adapun sasaran dari tersusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Balikpapan terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta aturan turunannya yang mengatur Program, Kegiatan sampai dengan subkegiatan Sekretariat DPRD;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang diberi pendanaan, antara lain :
  1. Jumlah Program sebanyak 2 (dua) Program  
Jumlah Kegiatan sebanyak 16 (enam belas) Kegiatan  
Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 61 (enam puluh satu) Sub Kegiatan
  2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kota Balikpapan, dikarenakan seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan program dan kegiatan yang sifatnya memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Balikpapan
  3. Pendanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan bersumber dari APBD Kota Balikpapan
- c. Terdapat ketidak sesuaian antara rancangan awal pendanaan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :
  1. Rencana pendanaan pembangunan Gedung kantor Sekretariat DPRD;
  2. Rencana kebutuhan pendanaan pembelian/ pemeliharaan aplikasi;
  3. Rencana kebutuhan pendanaan Kerjasama dengan media online;
  4. Rencana kebutuhan bimtek DPRD;
  5. Rencana kebutuhan koordinasi konsultasi tenaga ahli;
  6. Rencana kebutuhan koordinasi konsultasi 7 (tujuh) fraksi.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan Tabel T-C. 33, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 6 :**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja Output	Target Kinerja		Pagu Dana	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS &amp; FUNGSI DPRD</b>	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	%	74	76	<b>50.030.442.229</b>	<b>38.703.813.867</b>
	<b>Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah &amp; Peraturan DPRD</b>	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	100	<b>9.782.999.750</b>	<b>7.034.800.000</b>
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	5	5	32.999.750	36.300.000
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	40	40	3.500.000.000	3.000.000.000
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	4	4	2.750.000.000	1.936.000.000
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	4	4	2.750.000.000	1.936.000.000

5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	750.000.000	126.500.000
	<b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	100	<b>3.800.000.000</b>	<b>2.400.000.000</b>
6	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	800.000.000	400.000.000
7	Pembahasan Perubahan Kua dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	800.000.000	400.000.000
8	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	800.000.000	400.000.000
9	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	800.000.000	400.000.000
10	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2	2	300.000.000	400.000.000
11	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	300.000.000	400.000.000
	<b>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	<b>5.099.997.500</b>	<b>16.000.000.000</b>
12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Laporan	48	48	750.000.000	2.000.000.000

		Pemerintahan dan Hukum					
13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	24	24	750.000.000	2.000.000.000
14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	48	48	750.000.000	2.000.000.000
15	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	48	48	750.000.000	2.000.000.000
16	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	24	24	750.000.000	2.000.000.000
17	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1	749.999.500	2.000.000.000
18	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	1	299.999.050	2.000.000.000
19	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Dokumen	1	1	299.998.950	2.000.000.000

		Kepala Daerah					
	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	100	<b>10.660.448.179</b>	<b>6.863.813.867</b>
20	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	5	45	165.000.000	1.500.000.000
21	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	90	90	2.500.000.000	1.000.000.000
22	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	35	35	6.413.000.000	3.000.000.000
23	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	6	6	709.368.279	723.813.867
24	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6	6	508.080.000	220.000.000
25	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	48	48	199.999.900	250.000.000
26	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	1	165.000.000	170.000.000
	<b>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Persentase Terlaksananya Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	100	<b>5.700.000.000</b>	<b>3.150.000.000</b>
27	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	2.700.000.000	150.000.000

28	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3	3.000.000.000	3.000.000.000
	<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	100	100	<b>1.099.498.250</b>	<b>600.000.000</b>
29	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	2	1	499.999.250	300.000.000
30	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	2	1	649.499.000	300.000.000
	<b>Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	%	100	100	<b>399.999.800</b>	<b>400.000.000</b>
31	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	2	2	249.999.900	250.000.000
32	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	2	2	149.999.900	150.000.000
	<b>Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD</b>	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Fasilitas Tugas DPRD	%	100	100	<b>13.487.498.750</b>	<b>2.255.200.000</b>
33	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	1	357.499.750	360.000.000

34	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	16	16	2.500.000.000	1.750.000.000
35	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	12	8.379.999.000	145.200.000
36	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	5	0	2.250.000.000	0
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>148.039.778.492</b>	<b>100.468.700.800</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>5.446.070.100</b>	<b>5.300.286.000</b>
37	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	13	13	5.446.070.100	5.300.286.000
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>445.660.000</b>	<b>420.670.000</b>
38	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	31	31	85.960.000	25.000.000
39	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	36	36	359.700.000	395.670.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>31.605.270.648</b>	<b>18.950.212.790</b>

40	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23	181.139.800	181.500.000
41	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	1.596.104.800	1.775.029.600
42	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	1.199.925.000	1.320.000.000
43	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	2.409.222.596	1.188.031.460
44	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	549.999.800	605.000.000
45	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	449.992.000	544.500.000
46	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	295	295	3.232.772.400	3.656.151.730
47	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	3	21.895.114.252	9.680.000.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang</b>	<b>Unit</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>824.999.994</b>	<b>907.500.000</b>



		<b>Disediakan</b>					
48	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	3	2	824.999.994	907.500.000
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>6.201.780.000</b>	<b>6.633.000.000</b>
49	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	880.000.000	968.000.000
50	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5	1.649.800.000	1.815.000.000
51	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	3.671.980.000	8.850.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>54.150.000.000</b>	<b>10.560.000.000</b>
52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	29	29	1.100.000.000	1.210.000.000

53	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	47.550.000.000	3.300.000.000
54	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	5.500.000.000	6.050.000.000
	<b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Nilai	70	74	<b>39.795.827.000</b>	<b>46.179.532.010</b>
55	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan	45	45	38.449.867.000	43.917.532.010
56	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	45	45	849.960.000	1.000.000.000
57	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	45	45	496.000.000	242.000.000
	<b>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</b>	IKM Layanan Administrasi DPRD	Nilai	72	74	<b>8.370.170.750</b>	<b>12.457.500.000</b>
58	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	10	10	1.040.172.000	181.500.000
59	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	6	6	649.998.750	726.000.000
60	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	270	270	4.180.000.000	8.800.000.000

61	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	4	4	2.500.000.000	2.750.000.000
	<b>Jumlah</b>					<b>198.070.220.721</b>	<b>139.172.514.667</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan. Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Adapun rancangan akhir Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	<b>Tabel 7 : Rancangan Akhir RKPD 2023</b>				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>	<b>72</b>	<b>Rp 89.889.778.492</b>
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72	Rp 5.446.070.100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72	Rp 445.660.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72	Rp 29.485.404.648

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	Rp 824.999.994
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	Rp 6.201.780.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	Rp 2.650.000.000
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	72	Rp 39.795.827.000
9	Layanan Administrasi DPRD	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	72	Rp 5.040.036.750
10	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Kota Balikpapan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi</b>	<b>74%</b>	<b>Rp 45.180.442.229</b>
11	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	Rp 9.382.999.750
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	Rp 3.800.000.000
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Rp 4.349.997.500

14	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	Rp 10.660.448.179
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	Rp 7.000.000.000
16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	Rp 1.099.498.250
17	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kota Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	Rp 399.999.800
18	Fasilitas Tugas DPRD	Kota Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Fasilitas Tugas DPRD	100%	Rp 8.487.498.750

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan penyusunan KUA PPAS Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dan sebagai instrument pengukuran capaian kinerja organisasi. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan yang berkualitas.

Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Balikpapan, 11 Juli 2022

Sekretaris DPRD Kota Balikpapan,

  
**IRFAN TAUFIK, S. Ag, M.Si**